# BAB II

# RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah Perusahaan

Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Merupakan salah satu unsur pemerintah Provinsi Jawa Barat yang di bentuk berdasarkan peraturan Daerah no.15 tahun 2000. Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Jawa Barat itu sendiri mempunya tugas pokok yaitu merumuskan kebijaksanaan operasional di bidang tata ruang dan permukiman di Jawa Barat serta melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi Jawa Barat dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan kepada gubernur.

Dalam menunjang dan mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Baratr untuk menjadi Provinsi termaju di Indonesia serta mitra terdepan ibu kota negara tahun 2010, Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Jawa Barat mengambil peran dalam pengembangan model pembangunan yang mengintegrasikan pertanian dan industri melalui :

1. Penciptaan Tata Ruang kawasan yang dinamis, ekonomis, antisipatif, transparan dan legitimate.
2. Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, tertib, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan pelayanan prima di bidang Tata Ruang dan Permukiman, jasa konstruksi, dan uji mutu kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Tujuan Dan Sasaran :

A. Visi

Dengan pelayanan prima, Dinas Tata Rauang Dan Permukiman Provinsi Jawa Barat menjadi andalan dalam mewujudkan Visi Jawa Barat pada tahun 2010.

B. Misi

1. Menciptakan aparataur yang beriman dan bertaqwa, profesional, bersih, dan beretos kerja tinggi.

1.1 Tujuan :

1.1.1 Mendukung peningkatan pelayanan masyarakat di bidang Tata Ruang dan Permukiman.

1.1.2 Mewujudkan aparatur yang professional/good governance.

1.1.3 Mewujudkan peran pelaku pembangunan yang profesional dalam penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi arsitektur bangunan dan jati diri kawasan.

1.2 Sasaran :

1.2.1 Terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat dibidang pengelolaan gedung negara di Jawa Barat.

1.2.2 Tersedianya SDM Kabupaten/Kota yang memadai di bidang Tata Ruang Dan Permukiman Di jawa Barat.

1.2.3 Terbinanya kemampuan aparatur antar unit kerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

1.2.4 Terselenggaranya koordinasi pembinaan SDM dan kinerja pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat jasa konstruksi di

22 Kabupaten/kota.

2. Menciptakan penataan ruang kawasan yang dinamis, akomodatif, antisipatif, transparan dan legitimate.

2.1 Tujuan :

2.1.1 Mewujudkan penataan ruang kawasan lintas kabupaten/kota yang dinamis, akomodatif, antisipatif, transparan dan legitimate.

2.1.2 Mewujudkan aparat kabupaten/kota yang berkualitas dalam pengendalian pembangunan bidang tata ruang dan permukiman.

2.1.3 Menciptakan kawasan yang menarik bagi penanam modal(investor).

2.2 Sasaran :

2.2.1 Tersedianya juklak/juknis/pedoman bidang tata ruang dan permukiman.

2.2.2 Tersedianya hasil perencanaan ruang kawasan untuk dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan di 2 kawasan andalan.

1.. Tersusunya tata ruang kawasan pada 7 kawasan andalan dan 6 core bisnis.

2.. Tersusnnya rencana detail tata ruang kawasan yang dapat diaplikasikan.

3.. Tersedianya petunjuk teknis pengendalian pemanfaatan bidang tata ruang dan permukiman.

4.. Tersusunnya rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan

tertentu dan strategis.

1. Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, tertib, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Tujuan :

3.1 Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni.

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSWORD.OLB 3.2 Mewujudkan pelayanan dan fasilitas standar pelayanan minimal prasarana dan sarana permukiman.

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSWORD.OLB 3.3 Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang permukiman.

Sasaran :

Tersedianya prasarana dan srana dasar permukiman, melalui konsep tri bina di perkotaan dan perdesaan di 7 kawasan andalan.

Tersedianya pelaku pembangunan yang mempunyai kemampuan dalam penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan di 7 kawasan andalan.

Tersedianya produk hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan aplikatif.

Tersedianya N, S, P, M bidang tata ruang dan permukiman.

Terselenggaranya fasilitas peran serta masyarakat dalam bidang permukiman di Jawa Barat.

Tersedianya sistem informasi bidang perumahan dan permukiman.

Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman Daerah (RP4D).

4. Meningkatkan pelayanan prima di bidang Tata Ruang dan Permukiman, jasa konstruksi, dan uji mutu kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan swasta.

4. Tujuan :

4.1.1C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSWORD Terwujudnya kelengkapan SOTK Dinas Tata Ruang Dan Permukiman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan prima.

4.1.2C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSWORD Terwujudnya peran lembaga yang optimal sesuai dengan kewenangannya.

4.1.3C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSWORD Terwujudnya kemitraan dalam rangka kemitraan, SDM dan kinerja penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

1. Sasaran :

4.2.1C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSWORD Tersedianya sistem jasa konstruksi dan uji mutu di Jawa Barat.

4.2.2C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSWORD Terselenggaranya kemudahan pelayanan dan akses dalam perizinan dan jaminan pertanggungan resiko bidang usaha jasa konstruksi di Jawa Barat.

3.2.1C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSWORD Terselenggaranya tata tertib usaha dan pelaksanaan serta pemanfaatan jasa konstruksi di 22 kabupaten.

## 2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Propinsi Jawa Barat Merupakan salah satu unsur pemerintah Propinsi Jawa Barat yang terletak di Jln. Kawaluyaan Indah II No.4 Bandung.

## 2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Propinsi Jawa Barat Merupakan salah satu unsur pemerintah Propinsi Jawa Barat yang di bentuk berdasarkan peraturan Daerah no.15 tahun 2000.

**1. Bidang Pekerjaan Perusahaan**

Pada saat ini Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Propinsi Jawa Barat memiliki beberapa bidang atau divisi kerja yang mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing, diantaranya :

I. Tugas Pokok :

Merumuskan kebijakan operasional dibidang Tata Ruang dan Permukiman dan melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi Propinsi dan kewenangan yang dilimpahkan oleh gubernur.

II. Fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang dan Permukiman meliputi Bina Program, Tata Ruang Kawasan, Perumusan Dan Permukiman, Prasarana Wilayah dan jasa Konstruksi.

b. Penyusunan pedoman pemberian perijinan di bidang Tata Ruang dan Permukiman serta pemberian perijinan penghunian rumah negara golongan III.

c. Penyelanggaraan pengelolaan teknis administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan umum.

d. Pemberian pelaksanaan tugas kepada Sub Dinas Bina Program, Tata

Ruang Kawasan, Perumahan dan Permukiman, Prasarana Wilayah dan Jasa Konstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya serta unit pelaksanaan Teknik Dinas.

## 2.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 2.5.1 struktur organisasi perusahaan